

ANALISIS PERMUKIMAN PEMULUNG SEBAGAI SEBUAH ASSEMBLAGE STUDI KASUS: PERMUKIMAN PEMULUNG DI WILAYAH JURANGMANGU, TANGERANG SELATAN

Eka Permanasari, Aldifra L. Lukman, Aninda Moezier, Ratna Safitri, Sahid.

Program Studi Arsitektur, Universitas Pembangunan Jaya,
Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, 15224, Indonesia
ekapermanasari@gmail.com

ABSTRAK. Keberadaan pemulung adalah suatu fenomena umum di kota-kota Indonesia. Dalam fenomena keberadaan pemulung, terdapat sebuah paradoks. Di satu sisi, terdapat pandangan bahwa pemulung memiliki pengaruh negatif bagi lingkungan sosial maupun fisik. Di sisi lain, pekerjaan sebagai pemulung memberi kontribusi positif dalam hal proses daur ulang sampah serta dalam memberikan alternatif lapangan kerja. Paradoks ini membuat keberadaan pemulung menarik untuk dikaji, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan banggunya.

Kajian mengenai pemulung dari sudut pandang sosial dan ekonomi telah banyak dilakukan dalam berbagai penelitian. Namun, sejauh ini, belum ada penelitian yang membahas persoalan pemulung dari sudut pandang lingkungan bangun permukimannya. Penelitian ini dilakukan untuk memberi kontribusi dalam hal tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pembentukan dan perubahan lingkungan bangun permukiman pemulung, berdasarkan hasil observasi terhadap dua permukiman pemulung di Jurangmangu, Tangerang Selatan, dan wawancara kepada penghuninya. Bentuk suatu lingkungan bangun terkait dengan pola kegiatan, serta dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan ekonomi dari manusia di dalamnya. Untuk itu, penelitian ini membahas tentang lingkungan bangun permukiman pemulung serta hubungannya dengan pola aktivitas dan sistem sosial ekonomi penghuninya.

Kata kunci: permukiman pemulung, assemblage.

ABSTRACT. *The phenomena of informal waste-picker settlements are very common in many cities in developing countries. Behind the rapid development and the image of economical wealth, lies beneath the informal waste-picker settlements which may often be overlooked. The existence of the informal waste-picker settlements is like two sides of a knife. On one hand, the settlements are often perceived as giving the negative impact to the social and physical condition of the city. On the other hand, their job in reducing waste and providing alternative employment is perceived as giving positive impact to the city. This binary oppositions and their impact to the social, economical condition and the built environment are the focus of this research*

There are some research on social and economical condition of informal waste-picker settlements. However, the research on the urban assemblage of informal waste-picker settlements are not very common. Therefore, this research focus on how the social and economical condition shape the informal waste-picker settlements in terms of urban assemblage.

This research investigates the development and transformation of the informal waste-picker settlements in two prime locations in Jurangmangu, South Tangerang. The methods are through observation and interview to key persons (leaders) on each settlement. The urban assemblage on these waste-picker settlements is heavily influenced by social and economical condition and activity of their users.

Key words: waste picker settlements, urban assemblage, informality

LATAR BELAKANG

Pemulung telah menjadi bagian dari penduduk kota-kota besar di Indonesia. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2008, jumlah pemulung di Indonesia diperkirakan

mencapai 1.256.804 orang (Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK, Kementerian Koperasi dan UKM, 2008) [1]. Definisi pemulung adalah "orang yang mencari nafkah dengan jalan mencari dan memungut serta memanfaatkan barang bekas dengan

menjualnya kepada pengusaha yang akan mengolahnya kembali menjadi barang komoditas” (Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2008) [2]. Dengan demikian, memulung dapat dikatakan sebagai salah satu mata pencaharian sektor informal yang menjadi alternatif solusi masalah pengangguran (Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK, Kementerian Koperasi dan UKM, 2008) [1].

Dengan memungut dan memanfaatkan barang-barang bekas, pemulung juga memberikan kontribusi dalam hal penanganan sampah. Penanganan sampah hingga kini masih menjadi masalah yang harus dicari solusinya oleh pemerintah di kota-kota besar. Sebagai contoh, menurut Koran Jakarta (2012), tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Sumur Batu di Kota Bekasi sudah melebihi kapasitas. Ketinggian gunung sampah di TPA tersebut sudah mencapai 15 meter, dan menimbulkan bahaya bagi orang-orang yang bekerja di sana.[3] Di tempat lain, TPA Bantar Gebang telah beberapa kali memperluas lahannya untuk menampung sampah daerah Jakarta. Mulai dari luas 108 ha, TPA itu kini telah mencapai luas 120 ha. Sedangkan di Kabupaten Tangerang, TPA Jati Waringin yang memiliki luas 12ha, diperkirakan akan penuh atau bahkan terlampaui kapasitasnya dalam 3-4 tahun mendatang (Antara News, 2011) [4]. Tanpa keberadaan pemulung, volume sampah yang harus ditangani akan menjadi jauh lebih besar daripada volume yang ada sekarang.

Namun selain kontribusi positifnya, keberadaan pemulung juga menimbulkan beberapa permasalahan, mulai dari masalah legalitas usahanya, hingga masalah yang ditimbulkan oleh lapak atau permukiman pemulung. Permukiman pemulung adalah tempat tinggal sekaligus tempat pemulung menyimpan hasil memulung. Dengan keberadaan pemulung, permukiman pemulung juga telah menjadi bagian dari *informal settlements* di wilayah kota. Seperti halnya keberadaan pemulung, keberadaan permukiman pemulung juga bersifat paradoksal. Di satu sisi, permukiman pemulung sebagai *informal settlements* adalah salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan akan permukiman yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah kota. Di sisi lain, permukiman pemulung dapat menimbulkan masalah kesehatan, ketertiban, dan keindahan bagi lingkungan fisik di sekitarnya.

Dengan adanya paradoks ini, pemulung dan permukimannya menjadi objek yang menarik untuk diteliti. Kajian mengenai pemulung dari sudut pandang sosial dan ekonomi telah banyak dilakukan dalam berbagai penelitian (lihat Cahyawati (1998), Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK, Kementerian Koperasi dan UKM (2008), dan Khoirudin (2007)). Namun, permukiman pemulung belum banyak dikaji dari sudut pandang lingkungan bangunannya. Penelitian ini menelaah lingkungan bangun permukiman pemulung dengan titik berat kepada proses pembentukan; cara perolehan dan sistem kepemilikan; penataan dan pembangunan unit rumah di dalamnya serta perpindahan dan perubahan yang terjadi; sistem sosial dan ekonomi di dalam permukiman pemulung dan kaitannya dengan bentuk fisik permukimannya; serta hubungan antara permukiman pemulung dengan lingkungan sekitarnya. [1,5,6]

Kajian mengenai permukiman pemulung dalam penelitian ini berfokus pada proses pembentukan dan perubahannya sebagai sebuah tempat. Untuk itu, teori mengenai *assemblage* yang menjelaskan mengenai tempat dan makna ruang digunakan sebagai kerangka konseptual. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah pengamatan dan wawancara di lapangan.

METODE PENELITIAN

Teori *assemblage* awalnya dipopulerkan oleh Deleuze dan Guattari dalam buku *A Thousand Plateaus* (1987). [7] Teori ini kemudian dikembangkan oleh DeLanda dalam bukunya *A New Philosophy of Society: Assemblage Theory and Social Complexity* (2006) [8]. DeLanda menggarisbawahi *assemblage* sebagai suatu *'layout'*; perletakan segala sesuatu yang mencakup benda, aktifitas, pemaknaan, dan proses penciptaan ruang.

Secara garis besar, *assemblage* merupakan 'kesatuan yang didapatkan dari hasil interaksi antar bagian' (DeLanda, 2006, hal. 5). Ketika kita memahami ruang dengan pendekatan *assemblage*, kita tidak memisahkan kebendaan (*materiality*) dengan pencitraan (*expression*). [8] Kedua hal tersebut dianggap *interconnected*: ketika kita memaknai sebuah ruang, hubungan antara kebendaan dan pencitraan hadir secara utuh dalam waktu yang bersamaan. Bagi DeLanda, konsep *assemblage* ini adalah satu cara untuk menghindari simplifikasi reduksi dalam memaknai tempat, baik reduksi dari sisi

esensial, pengalaman subyektif, maupun teks. Pemaknaan tempat hadir ketika hubungan interaksi antar bagian menunjukkan kesatuan yang utuh (*contingent*). Kesatuan ini kemudian dapat dipindahkan ke tempat lain sebagai *assemblage*, yang dapat menyatu dengan yang lain membentuk *assemblage* baru. [8]

Sebagai *assemblage*, sebuah tempat pasti berubah. Menurut Deleuze, sebuah *assemblage* adalah objek dari proses *territorialization* dan *deterritorialization*. Sebuah *assemblage* dapat di-*stabilized* dan di-*destabilized* baik dari sisi material, penggunaan ruang, maupun pemaknaan. Di dalam *assemblage*, proses *territorialization* dan *deterritorialization* terjadi secara terus menerus. Dengan demikian, ruang adalah sebuah tempat yang dinamis. Bagi Deleuze dan Guattari, *territoriality* lebih merupakan proses kreatif daripada defensif, karena dengan proses ini sebuah tempat menjadi kaya akan makna dan 'menjadi' (*becoming in the world*). [7]

Proses *territorialization* dan *deterritorialization* ini berkaitan dengan teori Deleuze dan Guattari mengenai *smooth* dan *striated space*. *Striated space* adalah ruang yang tetap, memiliki batasan, interval, dan pemisahan yang jelas; *striated space* dirasakan sebagai ruang yang berbatas (Deleuze & Guattari, 1987, hal. 481). [7] Sebaliknya, *smooth space* didefinisikan sebagai bentuk yang menerus, tidak memiliki interval yang teratur. *Striated space* dapat diibaratkan sebagai sebuah kota, sedangkan *smooth space* diibaratkan sebagai lautan. Tetapi, seperti dijelaskan oleh Deleuze dan Guattari, kedua konsep ini bisa saling bertukar posisi. Kota bisa dianggap sebagai *smooth space* jika kita melihat dari sisi pemekarannya, sementara lautan bisa dianggap sebagai *striated space* saat penglihatan terbatas oleh cakrawala dan batas pandang maupun ketika kita menempatkan lautan tersebut dalam sebuah peta. Dalam kajian mengenai permukiman, bila kita mengacu kepada teori di atas, upaya untuk menata permukiman menurut aturan tertentu dapat dianggap sebagai perwujudan dari *striated space*, sedangkan bagaimana permukiman tersebut menyelip di antara permukiman penduduk dapat dikatakan sebagai perwujudan sebuah *smooth space* (Permanasari, 2012). [9]

Permukiman pemulung sebagai sebuah tempat, tentu memiliki aspek kebendaan, ekspresi, dan pemaknaan dalam proses pembentukan dan perubahannya. Penelitian

ini menelaah permukiman pemulung sebagai sebuah *assemblage*: bagaimana bentukan fisik ruang-masa, pemaknaan, dan aktivitas hidup yang terjadi di dalam permukiman tersebut semuanya *interconnected*, tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Dalam pembentukan dan utilisasi permukiman pemulung tersebut, terjadi proses *territorialization* dan *deterritorialisation* secara terus menerus, yang menghasilkan *smooth* dan *striated space*.

Pemahaman mengenai permukiman pemulung sebagai sebuah *assemblage* diperoleh dengan metode observasi dan wawancara. Metode observasi digunakan untuk menganalisis penggunaan ruang dalam aktivitas sehari-hari. Tujuan observasi adalah untuk memahami struktur sosial dan sistem operasi (*operational system*) yang berlaku. Dalam penelitian ini, digunakan tiga metode observasi sebagai berikut:

1. Observasi Perilaku (*Behavioral Observation*)
Observasi perilaku mempelajari tanda-tanda fisik, pergerakan manusia, dan bahasa tubuh sebagai indikator dari perilaku, sikap, dan ekspresi (Nachimias & Nachimias, 1976). [10] Dalam penelitian ini, observasi perilaku digunakan untuk memahami penggunaan ruang dalam permukiman pemulung, hirarki sosial, serta kegiatan yang menunjukkan interkoneksi antar elemen dalam ruang. Pengguna ruang (penghuni permukiman) akan diklasifikasikan sebagai kepala pemulung, anggota pemulung, pengepul barang bekas, anggota keluarga pemulung, serta pengunjung.
2. Analisis Jejak (*Traces Analysis*)
Analisis jejak berkaitan dengan observasi perpindahan rumah-rumah dalam lapak, perpindahan akses, lokasi pengumpulan barang bekas sebelum diangkut ke luar, serta bagaimana pagar menjadi *fluid* ketika ada interaksi antara penghuni dengan dunia luar. Tujuan analisis jejak adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang penggunaan dan pemaknaan ruang yang berubah secara cepat. Dengan demikian, analisis jejak ini akan mengungkapkan penyebab, *intention* (hal yang mendasari), dan proses yang terus menerus dari perubahan ruang.
3. Analisis Foto (*Photographic Analysis*)
Analisis foto berfungsi untuk merekam perilaku serta jejak kegiatan dan bentukan fisik. Analisis foto dilakukan sebagai penunjang observasi perilaku dan analisis

jejak. Untuk merekam berbagai kegiatan, pengambilan foto akan dilakukan pada setiap permukiman pemulung dalam rentang waktu empat bulan secara acak.

Wawancara dilakukan dengan beberapa pemeran utama seperti kepala pemulung, anggota pemulung, anggota keluarga pemulung, dan masyarakat sekitar. Wawancara dilakukan untuk memahami pembentukan dan perubahan ruang permukiman pemulung; sistem tata kelola di dalam permukiman pemulung; aktivitas sehari-hari di dalam permukiman pemulung; hubungan antara permukiman pemulung dengan permukiman di sekitarnya; serta penyediaan dan pengaturan penggunaan fasilitas umum di dalam permukiman pemulung.

Melalui observasi dan wawancara, diperoleh gambaran mengenai pembentukan permukiman pemulung beserta faktor-faktor yang mendorong dan/atau mempengaruhinya. Bila mengacu kepada teori *assemblage*, kekayaan informasi berupa beragam sudut pandang, aktivitas, peristiwa yang terjadi, dan cerita dari para penghuni inilah yang menentukan pemaknaan permukiman pemulung tersebut. Pemaknaan ini kemudian dapat dipercaya tidak hanya oleh persepsi

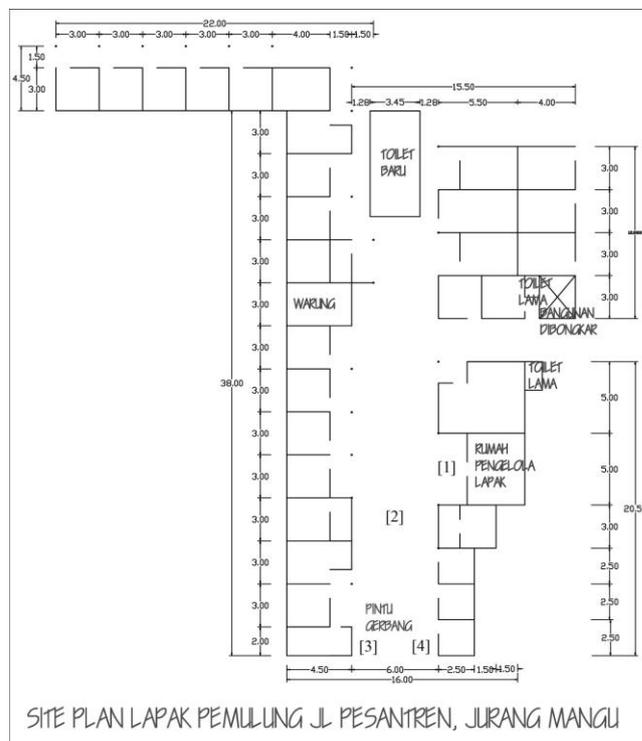
peneliti, namun juga oleh interpretasi pembaca. Dengan pertimbangan tersebut, deskripsi objek-objek studi berikut ditampilkan secara naratif, untuk menerangkan proses penelitian yang sudah dilakukan, sekaligus untuk memberi ruang bagi pembaca dalam membuat interpretasi berdasarkan pemahaman masing-masing.

ANALISIS STUDI KASUS

Penelitian ini mempelajari dua permukiman pemulung di Jurangmangu, Tangerang Selatan sebagai objek penelitian, yaitu permukiman pemulung di Jl. Pesantren dan permukiman pemulung di Jl. Sarmili.

Permukiman Pemulung Jl. Pesantren, Jurangmangu, Tangerang Selatan

Permukiman pemulung Jl. Pesantren dipimpin dan dikelola oleh Pak Slamet. Lahir tahun 1980 di Bangkalan, Madura, pada umur 9 tahun (kelas 2 SD) Pak Slamet pindah ke Jakarta membantu pamannya berdagang bakso, soto, dan terakhir berjualan sate. Pada pertengahan tahun 2000, selain berjualan sate, Pak Slamet mulai tertarik bekerja sebagai pemulung mengikuti jejak salah satu kerabatnya.



Gambar 1a. Tata Letak dan Penggunaan Ruang di Permukiman Pemulung Jl. Pesantren, Jurangmangu



1. Rumah Pak Slamet
(Pemimpin Lapak)



2. Pengumpulan Barang
di Hari Penjualan kepada Pengepul



3. Bangunan di Sisi Depan Permukiman
(dekat Pintu Gerbang)



4. Bangunan di Sisi Depan Permukiman
(dekat Pintu Gerbang)

Gambar 1b. Tata Letak dan Penggunaan Ruang
di Permukiman Pemulung Jl. Pesantren, Jurangmangu

Melihat peluang yang lebih menjanjikan, pada tahun 2001 Pak Slamet mulai bekerja sebagai koordinator pemulung dengan menyewa tanah di Tegal Rotan. Di lahan tersebut, telah terdapat dua bilik rumah yang sebelumnya juga digunakan sebagai lapak. Hal ini memberikan keleluasaan bagi Pak Slamet untuk mengembangkan lahan tersebut. Dalam tiga tahun, jumlah pemulung yang bekerja di bawah pengelolaan Pak Slamet bertambah, sehingga lapak berkembang menjadi sepuluh bilik.

Setelah tiga tahun di Tegal Rotan, Pak Slamet dan kelompoknya pindah ke Jl. Sarmili. Dengan kondisi lahan sewaan yang lebih luas daripada di Tegal Rotan, Pak Slamet diuntungkan karena pemilik lahan sudah mengizinkan tanahnya dipakai untuk tempat tinggal pemulung. Namun, ternyata penambahan jumlah bilik tidak terlalu signifikan. Dari sepuluh bilik di Tegal Rotan, di Jl. Sarmili terdapat dua belas bilik tempat tinggal pemulung.

Setelah lima tahun tinggal di Jl. Sarmili, sekitar 2009-2010 Pak Slamet dan kelompoknya harus mencari lahan lain karena lahan di Jl. Sarmili akan dikembangkan oleh pemiliknya. Pada saat itu, adik Pak Slamet mengelola lapak di Jl. Pesantren. Adiknya menyewa 2

lahan yang dipisahkan oleh Jl. Pesantren; lahan pertama dikelola langsung oleh adik Pak Slamet, sedangkan lahan kedua dikelola oleh keponakannya. Lahan kedua ternyata tidak dikelola dengan baik, sehingga Pak Slamet melihat peluang untuk mengembangkan lahan tersebut. Pak Slamet kemudian mengambil alih pengelolaan lahan kedua dan membawa rombongannya dari Jl. Sarmili untuk menetap dan bekerja di Jl. Pesantren hingga kini.

Lahan yang dikelola Pak Slamet di Jl. Pesantren ini memiliki luas 1530 m². Lahan ini disewa Pak Slamet dari seorang pemilik lahan. Pada saat kelompok Pak Slamet pindah ke lahan ini, di lahan tersebut sudah terbangun beberapa unit hunian yang ditempati oleh pemulung di bawah koordinasi keponakan Pak Slamet. Hunian-hunian tersebut dibangun secara berderet di kedua sisi lahan. Pak Slamet kemudian menetapkan lokasi rumahnya di bagian tanah yang masih kosong, di salah satu sisi lahan. Dia membangun rumahnya dengan ukuran lebih besar daripada modul yang sudah ada sebelumnya. Setelah itu, rumah anggota lainnya dibangun dengan meneruskan barisan hunian yang sudah ada ke arah belakang lahan. Dengan proses demikian, maka rumah Pak Slamet saat ini berada di tengah salah satu deret hunian.

Dalam pembangunan hunian, elemen dinding luar dan atap dibangun secara bergotong-royong, sedangkan teras depan, bagian belakang, dan interior dikerjakan sendiri oleh masing-masing penghuninya. Material yang digunakan untuk membangun adalah barang-barang bekas yang berasal dari tempat sebelumnya, dan juga barang-barang bekas tambahan dari hasil memulung atau meminta dari pihak lain. Walaupun ada prioritas penggunaan material tertentu, namun penggunaan material disesuaikan dengan ketersediaan. Sebagai contoh, untuk penggunaan atap, ada prioritas untuk menggunakan seng gelombang. Akan tetapi, bila seng gelombang tidak tersedia, maka para pemulung memanfaatkan bahan lain yang tersedia, seperti tripleks bekas, terpal, atau plastik.

Posisi hunian tiap anggota ditentukan oleh Pak Slamet dengan pertimbangan tertentu sesuai pemahaman Pak Slamet tentang karakter anggotanya. Pak Slamet juga memiliki kewenangan untuk menentukan perubahan perletakan bangunan bila diperlukan. Perubahan ini dapat terjadi secara cepat. Sebagai contoh, dalam observasi ditemukan adanya perubahan perletakan dan tampilan bangunan yang terjadi hanya dalam kurun waktu tiga minggu. Perubahan ini disebabkan karena pemilik lahan akan menggunakan bagian belakang lahannya. Karena itu, Pak Slamet harus memindahkan unit-unit hunian anggotanya yang berada di bagian itu, ke bagian depan lahan.

Ukuran modul unit hunian juga ditentukan oleh Pak Slamet, yaitu sebesar 3m x 3m. Bila terdapat penambahan anggota keluarga, penyediaan kebutuhan ruang menjadi tanggung jawab keluarga yang bersangkutan. Mereka diperbolehkan untuk menambah ruang ke bagian depan bangunan hingga teras depan, atau mengembangkannya ke bagian belakang.

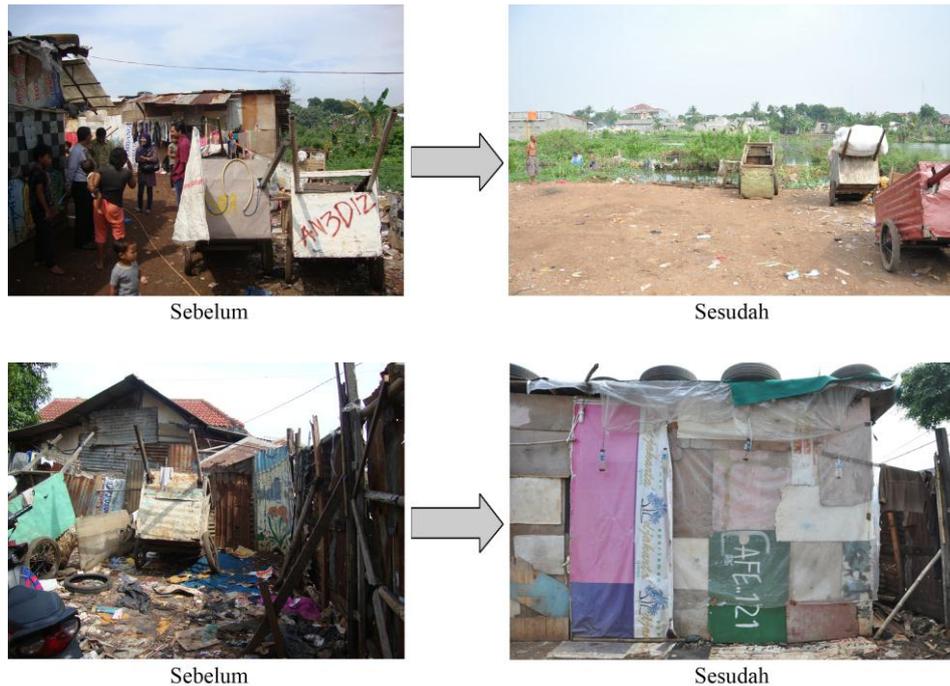
Saat ini, di permukiman pemulung Jl. Pesantren terdapat 32 keluarga atau 125

penghuni. Di antara 32 keluarga, selain keluarga Pak Slamet hanya ada satu keluarga lain yang menempati lebih dari satu kaveling. Keluarga ini memperoleh hak tersebut karena anggotanya melebihi lima orang. Dengan demikian, hunian yang terbangun hingga kini adalah 33 kaveling.

Dalam sistem sosial di permukiman ini, salah satu keunikan yang ada adalah cara merekrut anggota. Pak Slamet hanya menerima tambahan anggota apabila direkomendasikan oleh pemulung lainnya. Selain itu, Pak Slamet juga tidak menerima anggota yang belum berkeluarga. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman Pak Slamet yang pernah menerima anggota yang masih bujangan dan ternyata anggota tersebut menimbulkan masalah seperti mabuk-mabukan dan mencuri. Pak Slamet mengambil kesimpulan bahwa sikap tidak bertanggung jawab itu ada kaitannya dengan status anggota tersebut yang belum berkeluarga.

Dalam keseharian, terdapat pembagian tugas yang berkaitan dengan struktur sosial. Umumnya suami bekerja mencari barang bekas, sedangkan istri bertugas menyortir hasilnya. Namun ada juga kondisi di mana keduanya bekerja mencari barang bekas sekaligus menyortirnya. Apabila si suami meninggal dunia, maka keluarganya memiliki dua pilihan. Pilihan pertama adalah tetap tinggal di lapak dengan konsekuensi istri dan/atau anaknya melanjutkan mencari barang bekas. Pilihan kedua, mereka tidak harus melanjutkan pekerjaan memulung dengan konsekuensi tidak dapat tinggal di lapak lagi.

Dalam sistem pengelolaan barang bekas, Pak Slamet tidak menetapkan jenis barang bekas yang harus dicari. Tiap anggota bebas mengumpulkan jenis barang bekas sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Barang bekas yang diperoleh kemudian dipilah berdasarkan jenisnya dan disimpan oleh masing-masing keluarga hingga waktu kedatangan pengepul tiba.



Gambar 2. Fluidity Permukiman Pemulung Jl. Pesantren, Jurangmangu

Pada prinsipnya, pemulung menjual barang bekasnya kepada Pak Slamet, dan Pak Slamet kemudian menjualnya kepada pengepul dengan selisih harga tertentu sebagai keuntungan. Pak Slamet menjual semua jenis barang bekas hanya ke satu pemulung. Pemulung ini dipilih Pak Slamet karena dinilai bertanggung jawab, meskipun harga yang ditawarkan pengepul tersebut relatif lebih rendah.

Penjualan barang dilaksanakan dalam siklus dua mingguan. Pada hari penjualan, pengepul datang ke Jl. Pesantren untuk menjemput barang bekas. Tiap anggota pemulung mengumpulkan dan mengangkut barang bekas ke tempat penimbangan. Pak Slamet kemudian mendata jumlah barang bekas yang terkumpul dalam satuan kilogram, dengan disaksikan oleh masing-masing anggota pemulung, sebelum kemudian diangkut oleh pengepul. Dalam proses penimbangan dan

penjualan, Pak Slamet mengaku tidak menunjuk wakil. Hal ini dilakukan guna memastikan tidak adanya kecemburuan sosial. Pada prakteknya, Pak Slamet dibantu oleh istrinya, terutama pada saat Pak Slamet sedang berhalangan.

Pak Slamet membayar barang bekas kepada anggotanya sekitar satu hingga dua hari kemudian. Pembayaran ini dikurangi dengan utang biaya operasional yang dipinjamkan Pak Slamet untuk periode dua minggu terakhir. Utang biaya operasional biasanya dipinjam oleh anggota pemulung kepada Pak Slamet dengan kisaran antara Rp.20.000,- hingga Rp.30.000,- per hari. Apabila selama dua kali penimbangan utang biaya operasional tidak terbayar oleh hasil penjualan, maka Pak Slamet akan mengurangi jumlah biaya operasional yang boleh dipinjam, yaitu sebatas harga barang bekas yang berhasil dikumpulkan.



1. Gerbang sebagai Akses Utama



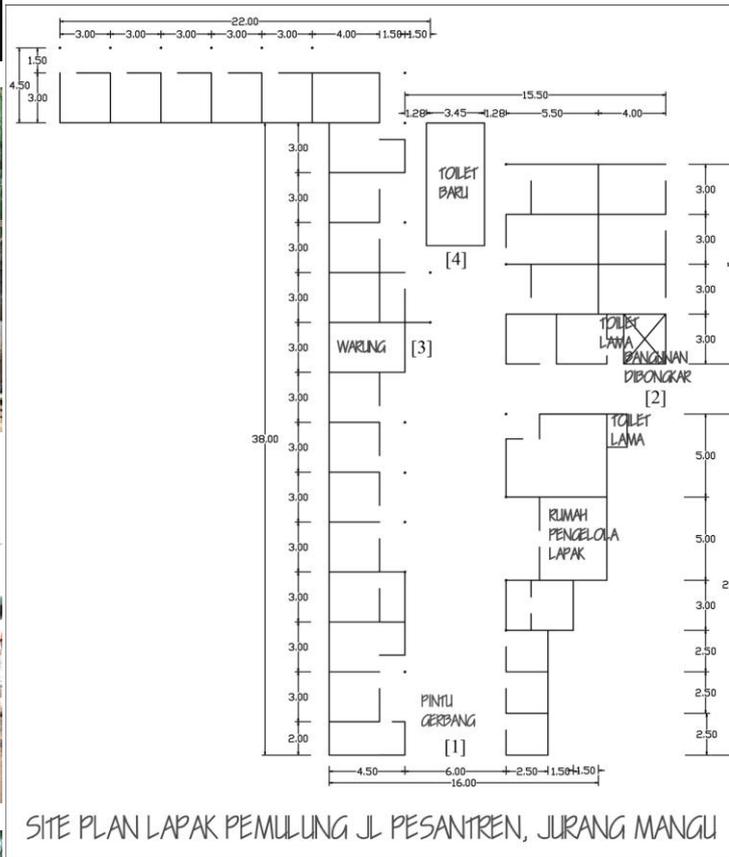
2. Akses Sekunder



3. Warung



4. Fasilitas MCK



SITE PLAN LAPAK PEMULUNG JL PESANTREN, JURANG MANGU

Gambar 3. Akses dan Fasilitas di Permukiman Pemulung Jl. Pesantren, Jurangmangu



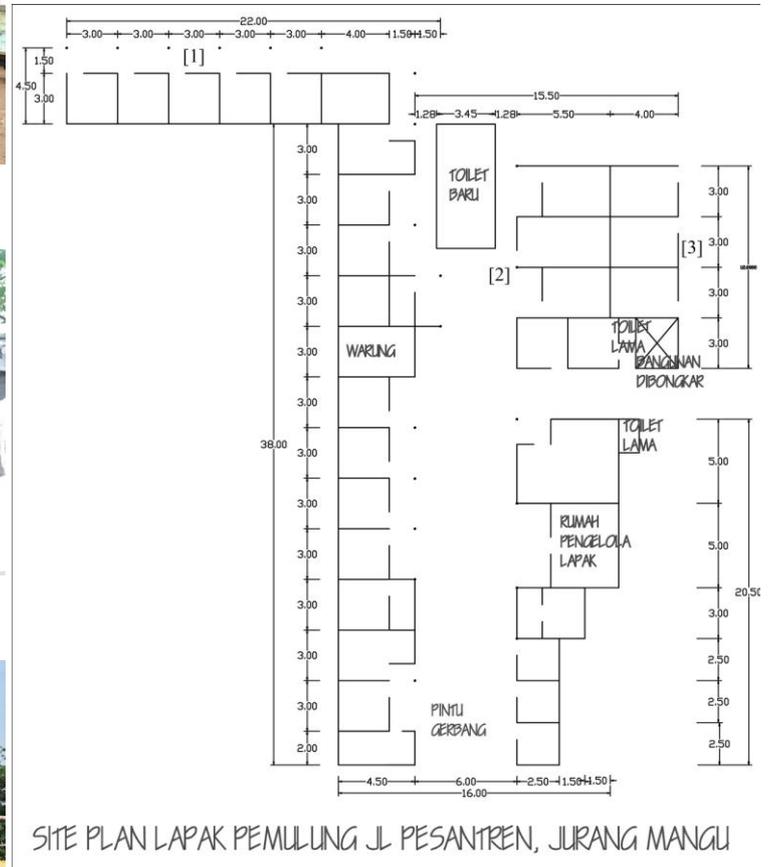
1. Deretan Unit Hunian di Sisi Belakang Permukiman



2. Deretan Unit Hunian di dalam Permukiman Pemulung



3. Deretan Unit Hunian di Sisi Luar Permukiman Pemulung



Gambar 4. Bentuk Fisik di Permukiman Pemulung Jl. Pesantren, Jurangmangu

Penghuni lapak juga sangat tergantung kepada Pak Slamet untuk mendapatkan beberapa fasilitas. Dari seluruh penghuni permukiman, hanya Pak Slamet yang terdaftar sebagai penduduk setempat. Anggota lainnya hanya dicatat datanya dan disampaikan kepada RT dan RW setempat. Dengan kepemilikan KTP yang sah, Pak Slamet bisa memperoleh listrik walaupun permukiman tersebut tidak memiliki ijin mendirikan bangunan.

Selain listrik, air juga disediakan oleh Pak Slamet. Adapun biaya pemeliharaan dan pemakaian rutin dibebankan pada masing-masing anggota. Biaya yang disepakati untuk iuran listrik adalah Rp.30.000,- per bulan;

namun besaran iuran ini tidak dipaksakan apabila ada anggota yang berkeberatan. Untuk mengumpulkan iuran listrik ini, Pak Slamet menunjuk satu orang yang bertugas mengumpulkan iuran. Orang tersebut juga bertugas untuk mengumpulkan sedekah apabila ada satu keluarga yang anggotanya meninggal.

Dalam hal fasilitas kesehatan, karena terdaftar sebagai warga tidak mampu, penghuni permukiman pemulung ini memperoleh pelayanan kesehatan gratis dari Puskesmas. Namun pada kenyataannya hanya sedikit yang menggunakannya. Demikian pula dengan pendidikan. Walaupun mendapatkan keringanan biaya, namun karena masih

banyaknya biaya lain yang harus mereka tanggung, hanya sebagian penghuni yang menyekolahkan anaknya hingga lulus SD. Pak Slamet adalah satu-satunya penghuni permukiman pemulung ini yang memiliki anak yang bersekolah hingga SMP.

Dalam hal keamanan, penghuni permukiman pemulung ini bertanggung jawab bersama untuk keamanan internal. Keamanan eksternal atau yang berhubungan dengan pihak luar (RT, RW, FBR, Forkabi) menjadi tanggung jawab Pak Slamet. Biaya yang dikeluarkan untuk urusan eksternal berkisar antara Rp.20.000,- hingga Rp.30.000,- per bulan.

Penghuni permukiman pemulung juga berusaha menjaga hubungan baik dengan warga di sekitarnya dan berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan seperti kerja bakti, di mana Pak Slamet akan memilih beberapa orang untuk mewakili kelompok mereka. Walaupun tidak memiliki ijin mendirikan bangunan, keberadaan permukiman pemulung ini memang sudah sepengetahuan RT dan RW setempat. Selain itu, menurut pengakuan Pak Slamet, tidak ada keberatan atau tanggapan negatif dari warga sekitar mengenai keberadaan permukiman mereka di tengah-tengah permukiman warga lainnya.

Permukiman Pemulung Jl. Sarmili, Jurangmangu, Tangerang Selatan

Studi kasus yang kedua adalah salah satu dari beberapa permukiman pemulung yang terletak di daerah Jl. Sarmili, Jurangmangu. Permukiman pemulung ini dikoordinir oleh Pak Marjuki. Pak Marjuki memulai lapak ini setelah dua tahun sebelumnya belajar dari saudaranya yang mengelola lapak lain. Sebelum tahun 1989, Pak Marjuki sudah mencoba berbagai pekerjaan sampai akhirnya mengikuti jejak saudaranya tersebut.

Di Jl. Sarmili terdapat empat permukiman pemulung yang menempati lahan milik pengembang Bintaro. Pembagian lahan dilakukan berdasarkan jumlah penghuni dan besaran uang sewa yang dibayarkan oleh tiap lapak. Permukiman-permukiman ini mendapatkan ijin dari oknum karyawan pengembang Bintaro, namun penghuni harus siap apabila suatu saat diminta pindah karena lahan yang ditempatinya sewaktu-waktu akan digunakan untuk pengembangan properti. Menurut Pak Marjuki, bila terjadi hal seperti itu, oknum karyawan pengembang menjanjikan untuk memindahkan lapak tersebut ke tempat

lain yang masih kosong. Lokasi yang saat ini didiami kelompok Pak Marjuki pun sebenarnya merupakan pindahan dari tempat sebelumnya yang berjarak hanya beberapa puluh meter di depannya. Pemindahan lokasi ini dilakukan karena lokasi yang sebelumnya digunakan oleh pengembang Bintaro sebagai fasilitas daur ulang sampah permukiman.

Untuk menggunakan lahan yang tersedia saat ini, Pak Marjuki membayar secara tidak resmi ke oknum karyawan pengembang, dengan biaya Rp.3.500.000,- per tahun dengan cara mencicil. Dengan uang tersebut, Pak Marjuki dapat menggunakan lahan dengan luas tertentu. Dengan keterbatasan lahan yang tersedia, Pak Marjuki tidak dapat menambah luasan lahan permukiman. Pengembangan usaha memulung pernah dicoba Pak Marjuki dengan cara lain, yaitu dengan mengembangkan permukiman pemulung lain di lokasi yang berbeda. Namun karena mengalami kesulitan dalam mengelola dua lapak terpisah, maka lapak yang baru terpaksa ditinggalkan.

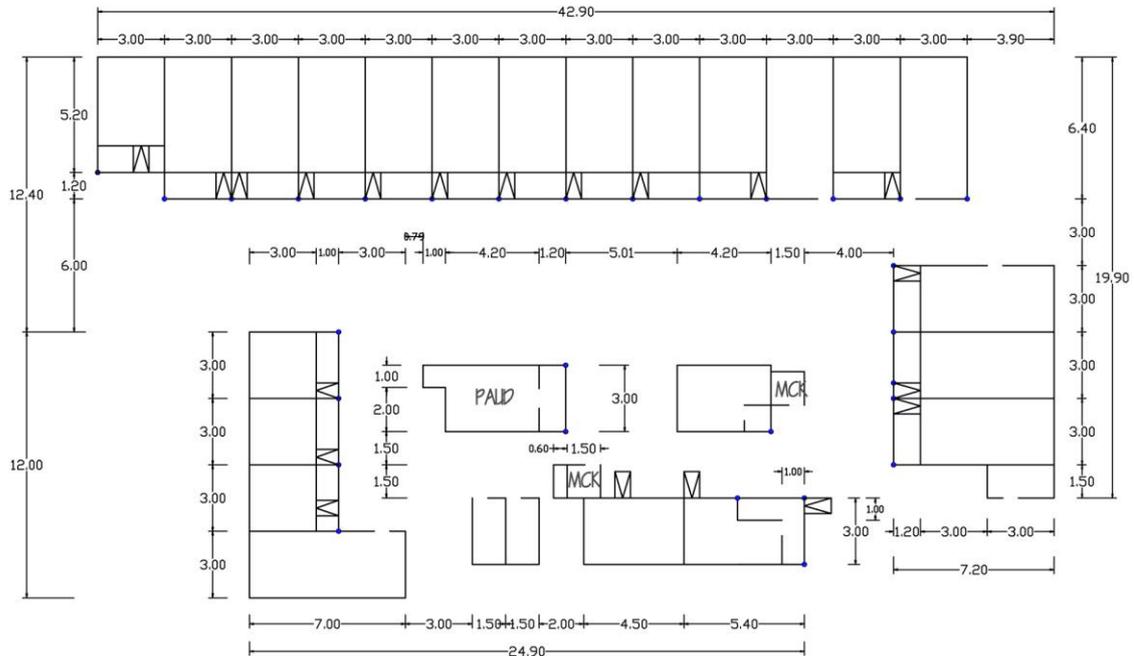
Permukiman pemulung yang dikoordinir oleh Pak Marjuki ini menempati lahan seluas 1068m². Karena permukiman ini adalah pindahan dari tempat sebelumnya, pada saat pembentukannya Pak Marjuki hanya mengoordinir anggotanya untuk memindahkan unit hunian masing-masing. Selain dibantu oleh anggotanya, Pak Marjuki juga membayar tukang bangunan, yaitu untuk mengerjakan bagian-bagian utama petak hunian. Biaya tukang bangunan ini ditanggung seluruhnya oleh Pak Marjuki. Selain itu, Pak Marjuki juga memberi upah kepada anggota pemulung yang membantu proses konstruksi.

Pak Marjuki memiliki wewenang untuk memutuskan tata letak permukiman dan menentukan lokasi masing-masing anggotanya. Penempatan lokasi disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga dan kebiasaannya. Pak Marjuki membagi satu petak hunian dengan modul berukuran 3,5m x 3,5m. Seseorang dengan anggota keluarga lebih banyak yang disebabkan bertambahnya anak atau memiliki keluarga baru, akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan lebih dari satu petak apabila lokasinya memungkinkan.

Bangunan hunian berbentuk rumah panggung dengan lantai yang ditinggikan kira-kira 50cm dari tanah. Bentuk panggung ini digunakan karena sering terjadi banjir akibat luapan air dari sungai yang berada di dekat permukiman.

Pak Marjuki hanya menyediakan bagian-bagian utama petak hunian, yaitu atap, dinding, dan lantai. Penambahan teras, bagian belakang rumah, serta interior diserahkan kepada penghuninya. Material bangunan didapatkan dari hasil memulung.

Selain itu, mereka juga mencoba untuk meminta barang sisa pada proyek konstruksi. Untuk material tertentu, khususnya untuk elemen yang bersifat struktural, mereka terpaksa membeli bahan baru.



Gambar 5. Tata Letak Permukiman Pemulung Jl. Sarmili, Jurangmangu



Gambar 6. Akses Masuk Utama ke Permukiman Pemulung Jl. Sarmili, Jurangmangu

Penghuni permukiman pemulung yang dikoordinir Pak Marjuki saat ini berjumlah 40 keluarga atau 84 orang. Untuk anggota baru, Pak Marjuki tidak memerolehnya dengan cara mencari pemulung, melainkan pemulunglah yang datang untuk meminta bergabung. Anggota baru yang diterima adalah yang telah dikenal oleh salah satu atau beberapa

penghuni lama. Pertimbangannya adalah karena orang yang tidak dikenal dan tidak dipercaya akan mempersulit proses pertanggungjawaban apabila terjadi masalah. Biasanya Pak Marjuki juga akan lebih memilih pemulung yang sudah berkeluarga daripada pemulung yang bujangan. Pertimbangannya adalah karena pemulung yang berkeluarga

dianggap lebih bertanggung jawab daripada pemulung yang bujangan. Namun, walaupun ada prioritas demikian, tetap ada pemulung bujangan yang bekerja kepada Pak Marjuki. Sementara itu, bila ada pemulung yang meninggal dunia, Pak Marjuki masih mengizinkan istri dan anaknya tinggal di permukiman tersebut, asalkan mereka meneruskan usaha memulung.

Dalam pengelolaan barang bekas, Pak Marjuki tidak menentukan barang apa yang harus dicari oleh anggota-anggotanya. Mereka bebas untuk mengumpulkan apapun asalkan didapatkan dengan cara yang halal. Para pemulung mengelola sendiri jadwal pencarian barang bekas mereka. Ada yang menyukai untuk pergi memulung pagi hari, ada pula yang cenderung melakukannya pada sore atau malam hari. Barang bekas yang terkumpul dipilah-pilah sesuai jenisnya. Beberapa jenis barang dibersihkan terlebih dahulu. Hasil yang diperoleh dikumpulkan di depan rumah masing-masing, dan biasanya diikat.

Penjualan barang bekas kepada pengepul dilakukan setiap dua minggu. Pada hari penjualan, pemulung mengangkut barang bekasnya ke tempat yang telah ditentukan, untuk kemudian ditimbang oleh Pak Marjuki. Prinsip penjualan barang bekas sama dengan di permukiman pemulung Jl. Pesantren: pemulung menjual barang bekas kepada Pak Marjuki, kemudian Pak Marjuki menjual kepada pengepul. Pak Marjuki mengambil untung dari selisih harga antara pemulung dan pengepul.

Pak Marjuki menjual barang bekas kepada tiga orang pengepul sesuai jenis barangnya. Pak Marjuki memilih mereka berdasarkan kredibilitas mereka dalam melakukan pembayaran dan kesediaan untuk memberikan pinjaman pada saat dibutuhkan. Pak Marjuki akan mencari pengepul lain apabila pengepul tempatnya menjual barang bekas saat ini tidak bisa melakukan pembayaran atau memberikan pinjaman sesuai perjanjian.

Pak Marjuki biasanya membutuhkan waktu satu hingga dua hari sejak penimbangan untuk melakukan pembayaran kepada anggotanya. Pembayaran ini dikurangi dengan utang anggotanya untuk biaya operasional selama periode dua minggu. Masing-masing anggota

kelompok Pak Marjuki meminjam biaya operasional ini dengan jumlah berkisar antara Rp.20.000,- hingga Rp.30.000,- per hari. Uang yang diberikan Pak Marjuki kepada para anggotanya—baik uang pembayaran barang bekas maupun uang pinjaman biaya operasional—diperoleh Pak Marjuki dari pengepul.

Menurut Pak Marjuki, rata-rata anggotanya bisa mendapatkan hasil memulung lebih besar dari pinjaman biaya operasionalnya. Namun apabila dalam dua minggu seorang anggota ternyata tidak mendapatkan hasil lebih besar dari pinjamannya, maka Pak Marjuki akan memotong pinjaman biaya operasional, disesuaikan dengan hasil memulung yang diperoleh anggota tersebut.

Pada hari hari penjualan barang bekas, biasanya Pak Marjuki dibantu oleh istri atau anaknya untuk kegiatan penimbangan. Bila Pak Marjuki sedang tidak berada di tempat, beliau hanya memercayakan urusan-urusan penting kepada istri atau anaknya. Bersama istrinya, Pak Marjuki juga berjualan di warung yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari bagi para pemulung.

Untuk kepentingan keamanan, Pak Marjuki juga tidak menugaskan siapapun, baik untuk keamanan internal maupun eksternal. Pak Marjuki sendiri juga tidak memiliki kewajiban untuk membayar pungutan keamanan atau pungutan lainnya. Satu-satunya pembayaran yang harus dilakukan Pak Marjuki adalah cicilan biaya penggunaan lahan.

Dalam hal pelayanan kesehatan, penghuni permukiman pemulung ini memperoleh hak mendapatkan fasilitas kesehatan dari Puskesmas. Walaupun demikian, para penghuni lebih memilih untuk memeriksakan ke klinik terdekat yang dikelola oleh sebuah masjid. Untuk masalah pendidikan, sebagian warga menyekolahkan anaknya di sekolah negeri maupun swasta. Sebagian warga membayar sendiri biaya pendidikan, sementara sebagian lainnya dibiayai oleh sebuah yayasan di kompleks Bintaro. Fasilitas air bersih untuk mandi maupun mencuci diperoleh penghuni tanpa harus membayar, karena sudah ditanggung oleh Pak Marjuki. Demikian juga dengan listrik, sudah disediakan oleh Pak Marjuki.



Gambar 7. Deretan Unit Hunian di Permukiman Pemulung Jl Sarmili, Jurangmangu



Gambar 8. Ramp sebagai Akses Masuk ke Unit Hunian

Pak Marjuki bisa mendapatkan listrik secara sah karena Pak Marjuki mempunyai KTP setempat. Tidak hanya Pak Marjuki, seluruh anggota kelompoknya juga memiliki KTP dan Kartu Keluarga setempat sebagai bukti kependudukan, walaupun permukiman mereka tidak memiliki ijin mendirikan bangunan. Terdaftar mereka secara resmi memungkinkan mereka memperoleh hak-hak sebagai penduduk setempat. Contohnya adalah pada saat adanya sosialisasi tabung gas 3kg, seluruh penghuni permukiman pemulung ini memperoleh kompor gas yang dibagikan sebagai bagian dari sosialisasi. Contoh lainnya adalah hak pilih mereka pada kegiatan pemilihan bupati, gubernur, anggota DPRD, anggota DPR, maupun presiden.

Adanya hak pilih, ditambah dengan struktur sosial di dalam kelompok pemulung ini, membuat kelompok ini memiliki posisi yang unik dalam bidang sosial-politik di lingkungan setempat. Dalam pemilihan, Pak Marjuki dapat mengoordinir para pemulung di lapaknya

untuk memilih salah satu kandidat, bila kandidat tersebut melakukan pendekatan kepada mereka dengan jumlah kompensasi yang sesuai. Mengingat banyaknya jumlah anggota kelompok Pak Marjuki yang memiliki hak pilih, bila mereka memilih satu kandidat yang sama suara mereka akan menjadi suara mayoritas di RT setempat.

Relasi antara penghuni permukiman pemulung ini dengan warga permukiman lain di sekitarnya tidak terbatas pada partisipasi dalam kegiatan sosial-politik. Menurut Pak Marjuki, hubungan antara penghuni permukiman pemulung ini dengan warga permukiman lain di sekitarnya selama ini berlangsung dengan baik. Sebagian istri dan/atau anak pemulung bekerja di kompleks perumahan sebagai pembantu rumah tangga. Di lain pihak, warga sekitar sering memberikan bantuan bagi warga permukiman pemulung ini, baik dalam bentuk bantuan barang maupun bantuan dana pendidikan dan kesehatan.



Gambar 9. Bangunan PAUD di Permukiman Pemulung Jl. Sarmili, Jurangmangu



Gambar 10. Fasilitas MCK di Permukiman Pemulung Jl. Sarmili, Jurangmangu

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian terhadap dua permukiman pemulung di atas, terlihat bahwa peran “Pemimpin” dalam proses pembentukan masing-masing permukiman sangat besar. Pemimpin mencari lokasi, menyewa lahan, membuat zonasi, menentukan tata letak dan besaran bangunan, serta mengoordinir pembangunan permukiman pemulung. Peran tersebut menjadikan sang Pemimpin memiliki kewenangan atas kepemilikan tanah dan bangunan.

Tidak hanya dalam proses pembentukannya, peran Pemimpin juga sangat besar dalam menentukan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kedua permukiman tersebut. Anggota kelompok hanya bisa mengikuti pola permukiman yang ditentukan atau diubah atas kewenangan pemimpinnya. Sebagai sebuah tempat, permukiman pemulung menjadi sebuah *assemblage* di mana perubahan menjadi sesuatu yang dinamis bagi pemimpin namun terbatas bagi penghuni. Perubahan ini terjadi dalam kurun waktu yang acak. Artinya, perubahan ini bisa terjadi sewaktu-waktu, kapan pun pemimpin merasa perlu menambah atau mengurangi jumlah unit hunian. Pemimpin pemulung juga bisa memindahkan unit-unit hunian ke bagian lain dari lahan permukiman, atau bahkan memindahkan seluruh permukiman ke lokasi yang baru.

Pembentukan dan perubahan lingkungan bangun secara terus menerus dalam kedua permukiman pemulung yang diteliti dapat dilihat sebagai proses *territorialization* dan *detrterritorialization* permukiman tersebut sebagai sebuah tempat. Proses *territorialization* dan *detrterritorialization* dalam permukiman pemulung dapat terjadi secara cepat. Proses ini menyebabkan sulitnya perubahan-perubahan tersebut dipetakan. Ruang menjadi sangat *fluid*, baik dari sisi pemaknaannya maupun dari sisi kegunaannya. Berdasarkan observasi, tingginya tingkat *fluidity* ini disebabkan oleh sistem pengelolaan penghuni yang diterapkan oleh Pemimpin, serta adanya perubahan dalam lokasi maupun batasan lahan.

Jika Pemimpin memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan dan perubahan permukiman, peran anggota kelompok terbatas pada menentukan elemen yang bersifat tambahan atau pelengkap. Segala bentuk perubahan yang dilakukan oleh para

anggota, harus tetap berada dalam koridor yang ditetapkan oleh Pemimpin. Namun demikian, anggota juga memiliki peran dalam pemaknaan ruang, yaitu melalui setiap hal (*things*) yang mereka lakukan, baik yang bersifat kegiatan maupun kebendaan. Pembentukan dan perubahan ini memunculkan *smooth* maupun *striated spaces* dalam kedua permukiman pemulung yang diteliti. Terbentuknya unit-unit hunian sesuai dengan aturan yang ditetapkan Pemimpin memunculkan *striated space*. Di sisi lain, penghuni masih memiliki ruang untuk melakukan modifikasi terhadap unit huniannya dengan mengintervensi aturan yang ada, dan ini adalah sifat dari *smooth space*. *Striated space* juga terbentuk saat permukiman itu dibuat sang Pemimpin dengan tata letak dan orientasi bangunan tertentu. Di sisi lain, Pemimpin kemudian dapat menggunakan kewenangannya untuk sewaktu-waktu mengubah tata letak dan orientasi bangunan—atau bahkan memindahkan seluruh permukiman ke lokasi yang baru. Hal ini memungkinkan apa yang semula bersifat tetap menjadi dinamis. Dalam kata lain, ruang dapat bertukar peran antara *striated* dan *smooth space*.

Peran sang Pemimpin yang sangat besar dalam pembentukan dan perubahan lingkungan bangun permukiman pemulung ini tidak terlepas dari perannya secara sosial-ekonomi dalam kelompoknya. Sang Pemimpinlah yang menentukan besaran uang pinjaman harian, pembagian hasil penjualan, pemilihan pengepul, serta proses perekrutan dan eliminasi anggota pemulung.

Jika dilihat aspek sosial-politik, terdapat perbedaan di antara kedua permukiman pemulung yang diteliti. Penghuni di permukiman pemulung Jl. Pesantren tidak memiliki akses politik, dan segala aktifitas sosial-politik diwakilkan oleh Pemimpin. Sementara itu, di permukiman pemulung Jl. Sarmili memiliki akses politik walaupun terbatas. Sebagai contoh, anggota memiliki hak pilih, namun pilihannya ditentukan oleh sang Pemimpin.

Terlepas dari kontroversi keberadaan permukiman pemulung, penghuni di kedua permukiman pemulung yang diteliti memiliki hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitarnya. Hal ini tidak terlepas dari peran sang Pemimpin dalam mengatur anak buahnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan

masyarakat, serta dalam menghindari dan meredakan konflik dengan masyarakat sekitarnya.

REFERENSI

[1] Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK, Kementerian Koperasi dan UKM. (2008, Desember). (2012). **Kajian Model Pengembangan Usaha di Kalangan Pemulung**. Dipetik Januari 19, 2012, dari Bab 1 Pendahuluan: http://www.smecda.com/kajian/files/PEMULUN-G-Smecda/2_BAB_1-3.pdf

[2] Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2008, Februari 4). Dipetik September 6, 2012, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan: <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>

[3] Koran Jakarta. (2012, Januari 2). **Megapolitan: Perkotaan: Bekasi Buang Sampah ke Daerah Rawan**. Dipetik Januari 19, 2012, dari Koran Jakarta: http://m.koran-jakarta.com/?id=79865&mode_beritadetail=1

[4] Antara News. (2011, Maret 28). *Antara News*. Dipetik Januari 19, 2012, dari Pemkab **Tangerang Tawarkan Kepada Investor Kelola Sampah**: <http://banten.antaranews.com/berita/15202/pemkab-tangerang-tawarkan-kepada-investor-kelola-sampah>

[5] Cahyawati, D. P. (1998). **Pengaruh Lingkungan Permukiman Pemulung terhadap Interaksi Sosial Penghuninya: Studi Kasus di Kelurahan Cipete Utara**. Depok: Thesis S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

[6] Khoirudin, A. (2007). **Proses Pemberdayaan Komunitas Pemulung dalam Menggunakan Alat Pelindung Kerja; Studi Kasus Pemberdayaan Pemulung di Pondok Labu Jaksel**. Depok: Thesis S2 Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia.

[7] Deleuze, G., & Guattari, F. (1987). **A Thousand Plateaus**. London, Athlone: University of Minnesota Press.

[8] DeLanda, M. (2006). **A New Philosophy of Society: Assemblage Theory and Social Complexity**. London: Continuum.

[9] Permatasari, E. (2012). *Lapak Houses: The Other Form of Gated Community?*

International Seminar on Livable Space. Jakarta: Universitas Trisakti.

[10] Nachimias, D., & Nachimias, C. (1976). **Research Methods in the Social Science**. United Kingdom: Edward Arnold.

DAFTAR BACAAAN

Dovey, K., & Raharjo, W. (2010). *Becoming Prosperous: Informal Urbanism in Yogyakarta*. Dalam K. Dovey, **Becoming Places: Urbanism/Architecture/Identity/Power** (hal. 79-101). New York: Routledge.

Dovey, K., & Raharjo, W. (2007). **Informal Settlement Field Trip--Yogyakarta**. Melbourne: University of Melbourne.

Fekade, W. (2000). *Deficits of Formal Urban Land Management and Informal Responses Under Rapid Urban Growth, An International Perspective*. **Habitat International**, 127-150.

Gauzal, M. (2006). **Praktik Pemukiman Liar: Dinamika Sosial di Balik Keberadaannya**. Depok: Thesis S2 Universitas Indonesia.

Jenkins, P. (2006). *Informal Settlements: Infernal and Eternal. The Role of Research in Policy Advocacy and Urban Informal Settlements in Angola*. In M. Huchzermeyer, & A. Karam (Eds.), **Informal Settlements: A Perpetual Challenge** (pp. 84-102). Cape Town: UCT Press.

Martin, R., & Mathema, A. (2006). *Clash of Civilization*. Dalam M. Huchzermeyer, & A. Karam (Penyunt.), **Informal Settlements** (hal. 126-145). Cape Town: University of Cape Town.

Simanjuntak, L. R. (2002). **Tinjauan tentang Fenomena Pemulung dan Penanganan Sampah di Wilayah DKI Jakarta dan Bantar Gebang Bekasi**. Bogor: Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Srinivas, H. (2012, April 7). **Defining Squatter Settlements**. Dipetik Mei 03, 2012, dari The Global Development Research Center: <http://www.gdrc.org/uem/squatters/define-squatter.html>

Thomson, M. (2011). *Space in the Urban Self-Built Environment*. **EWB-UK National Research and Education Conference 2011**, (hal. 62-70).

Tunas, D. (2008). **The Spatial Economy in the Urban Informal Settlement.** Delft: International Forum on Urbanism.

United Nations Human Settlements Programme. (2003). **The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements 2003.** London dan Sterling: Earthscan Publication Ltd.